

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

Penelitian mengenai kebijakan perlindungan dan jaminan sosial dalam penanggulangan bencana ini dilakukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Jakarta Pusat. Maka berdasarkan perihal tersebut akan dijelaskan mengenai deskripsi sistem organisasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta deskripsi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang memiliki wewenang di Kementerian Sosial dalam menjalankan kebijakan tersebut, dan yang paling terakhir adalah deskripsi kelompok TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang bertugas dilapang dan pihak yang terjun langsung dalam menangani bencana. *Pertama*, peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum organisasi atau struktur yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang berisikan profil, visi dan misi, data lainnya. *Kedua*, peneliti akan menjelaskan tentang struktur Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Taruna Siaga Bencana yang berisikan seperti halnya data sebelumnya.

#### **3.1 Gambaran Umum Kementerian Sosial**

Kementerian Sosial menjadi salah satu pilar utama yang ikut ambil bagian sebagai representasi Negara untuk mengaktualisasikan kewajiban konstitusinya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial terutamanya. Dalam UUD 1945 Pasal 34 di jelaskan secara tegas bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (ayat 1) dan amanat yang selanjutnya Negara berkewajiban dan berhak mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2). Pelayanan di bidang kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan pendekatan praktik pekerjaan sosial yang secara normatif diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 yang berisikan mengenai kesejahteraan sosial, sebagai pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok kesejahteraan sosial. Peran dan fungsi Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial semakin mengemuka, dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

#### **1. Visi, Misi, Tujuan dan Arah Strategi Kementerian Sosial**

Secara filosofis, inti tugas dan fungsi Kementerian Sosial terfokus pada upaya mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri atau “Tat Twam Asi”, yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menolong diri mereka sendiri merupakan inti yang mendasar atau faktor utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang sedang mereka alami, serta berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Perihal tersebut, *Visi* dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas langsung dalam membantu Presiden untuk 5 (lima) tahun kedepan akan di jelaskan sebagai berikut:

***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”.***

Visi tersebut memiliki pengertian atau makna, bahwa bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemandirian kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja, serta kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan sosial.

Untuk *Misi* dari Kementerian Sosial sangat berkaitan erat dengan visi yang telah dijabarkan diatas, upaya yang dilaksanakan guna mewujudkan visi pembangunan nasional (2014-2019) yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional. Dan Kementerian Sosial sendiri melaksanakan misi yang ke 4 (empat) dan menjadi misi atau tujuan Kementerian Sosial untuk lima tahun yang mendatang, misi itu adalah:

***“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”.***

Misi ini melekat erat dengan peran dan fungsi dari Kementerian Sosial dan dilaksanakan untuk:

- a Mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat
- b Memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, dan

- c Meningkatkan kualitas hidup dan memulihkan fungsi sosial bagi kelompok miskin dan rentan termasuk PMKS

Selanjutnya adalah **Tujuan** dari Kementerian Sosial, target yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

***“meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan”***

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial dan menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang berkenaan dengan Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa Fakir Miskin merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya.

Pengertian dari rentan adalah orang yang kurang mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan fungsi sosialnya, dampak dari keadaan fisik dan/atau non-fisik. Kelompok rentan diantaranya; penyandang disabilitas, penyandang tuna sosial, lanjut usia, anak, perempuan, korban bencana, korban diskriminasi dan/atau perdagangan orang, serta komunitas adat terpencil (KAT). Kelompok rentan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, masuk dalam kriteria PMKS.

Untuk *Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja* pada Kementerian Sosial akan dijelaskan sebagaimana berikut ini:

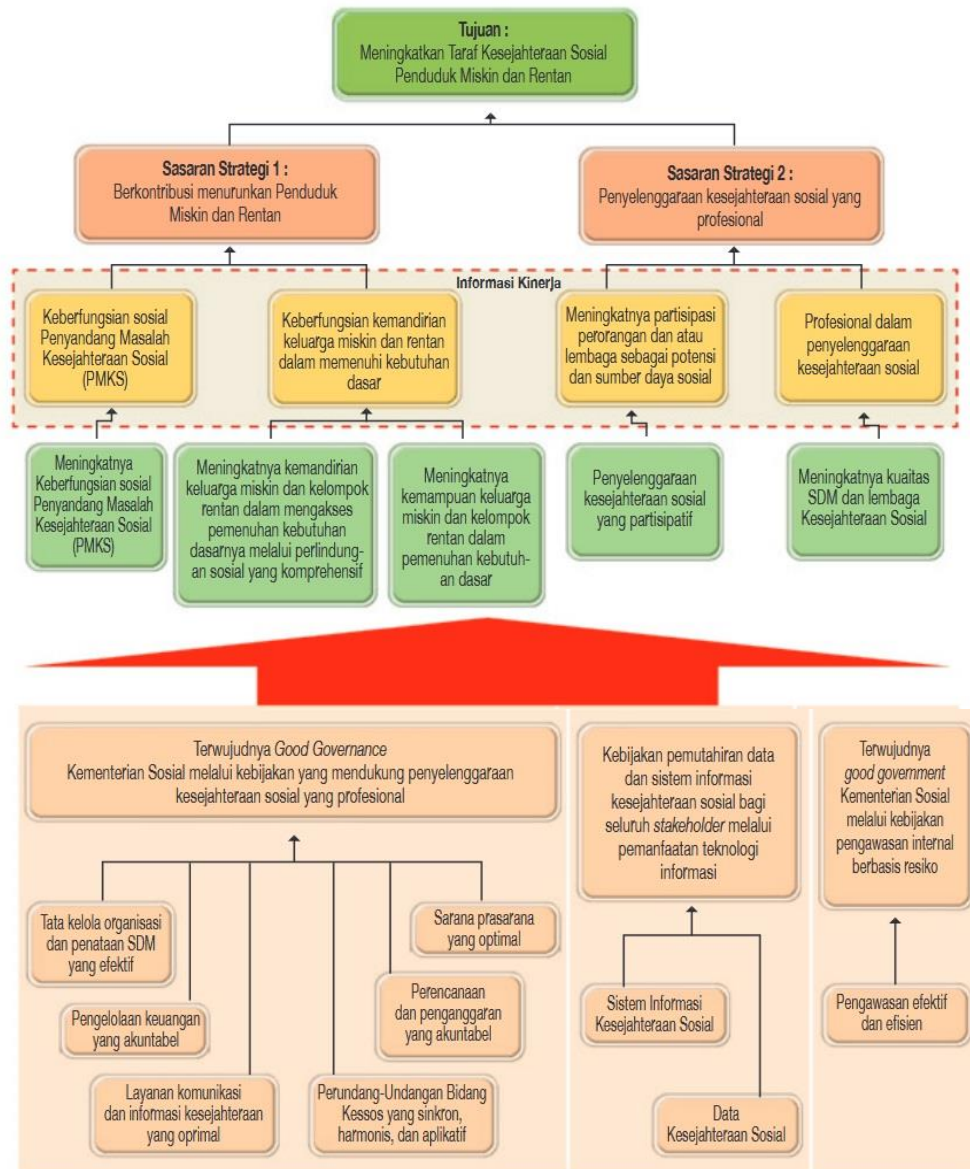
- a Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan
- b Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang rentan

Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan dengan 2 (dua) indikator utama yaitu: persentase fakir miskin dan persentase penduduk rentan. Sementara untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional memiliki 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi yaitu: persentase SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi, persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi, dan Persentase Partisipasi Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran strategis tersebut didukung oleh kebijakan: *pertama* mengenai kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional dan berkompeten dalam mendukung terwujudnya *good governance*, *kedua* pemutakhiran data dan sistem informasi kesejahteraan sosial bagi seluruh *stakeholder* dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan *ketiga* pengawasan internal berbasis risiko dalam mendukung terwujudnya *good government* dan *clean government*. Yang merupakan impian dan cita-cita bersama yang mengkehendaki pemerintahan yang kondusif tanpa adanya tindakan yang dapat merugikan semua pihak. Lebih jelasnya sasaran strategis

Kementerian Sosial untuk periode kepemimpinan saat ini dapat dilihat pada Peta Strategis berikut:

**Gambar 3.1 Peran Strategi Kementerian Sosial**



Sumber : Perubahan RENSTRA Kementerian Sosial 2018

## **2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Tugas Kementerian Sosial adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah.
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, dan

9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Sosial memiliki 7 (tujuh) Eselon 1 yang memiliki peran yang sangat penting atau krusial. Dimana masing-masing dari mereka memimpin jabatan tinggi di organisasi, yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial, Sekretariat Jenderal memiliki tugas sebagai penyelenggara koordinasi pelaksana tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari: Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat, Pusat Data dan Informasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Inspektorat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial, tugas dari Inspektorat Jenderal antara lain: menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Organisasi terdiri dari : Sekretariat Inspektorat, Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Inspektorat Bidang Penunjang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan kebijakan di bidang perlindungan



dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan NAPZA, Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung 39 UPT.

5. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat; Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial; Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri Sosial, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara dan Kelompok Jabatan Fungsional.

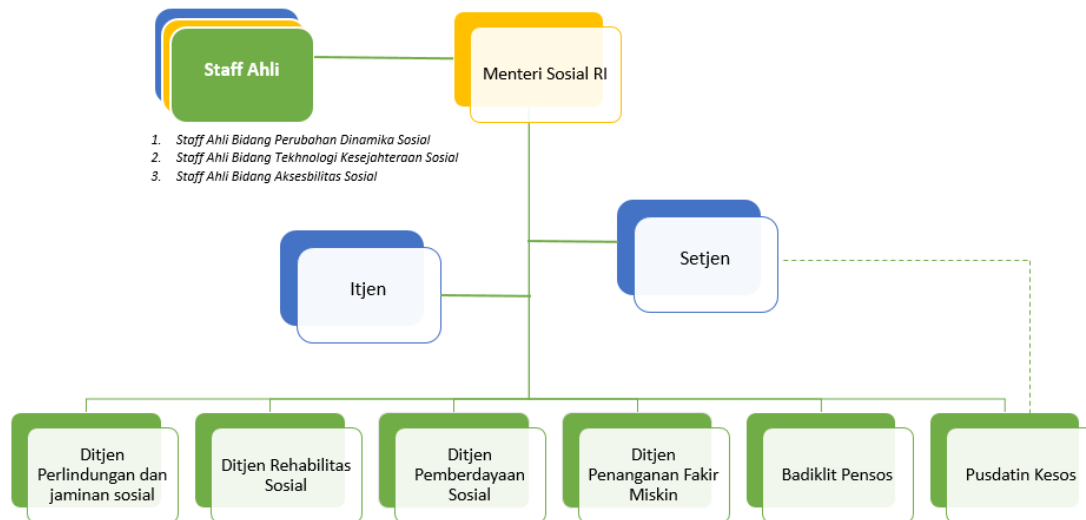
7. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penyuluhan sosial. Susunan organisasi terdiri dari : Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengembangan Profesi Sosial dan Penyuluhan Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional yang didukung oleh 8 UPT.

8. Staf Ahli Menteri, berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri Sosial, bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang tugasnya. Staf Ahli terdiri dari :

- a Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
- b Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
- c Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kementerian Sosial**

**(Permensos No. 20/2015)**



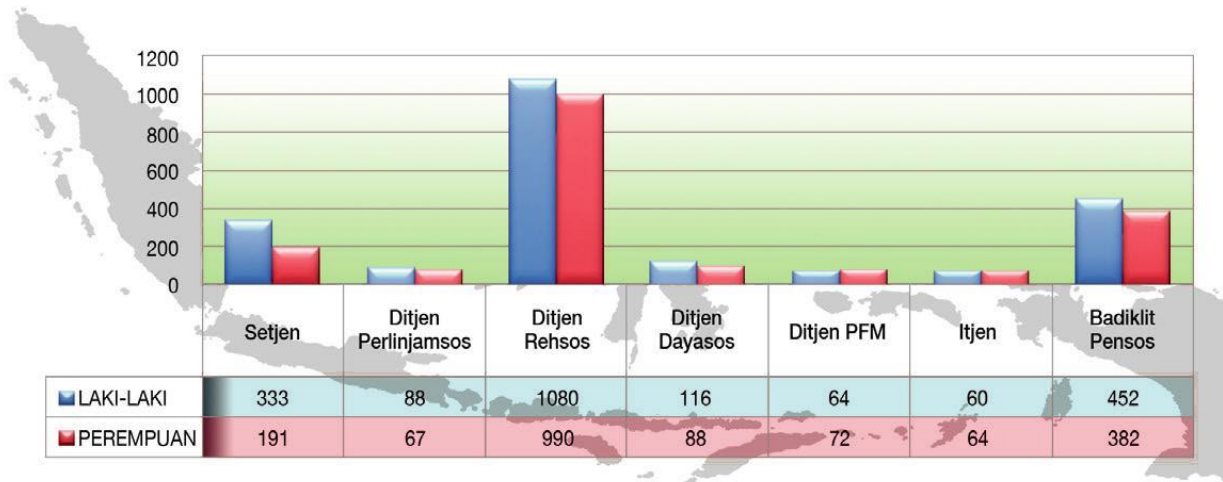
Sumber : LAKIN Kementerian Sosial 2016

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Sosial

Jumlah Pegawai Kementerian Sosial (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 mencapai 4.047 orang dengan komposisi Jenis Kelamin Laki-laki sebesar 2.193 orang atau 54,19% dan Perempuan sebesar 1.854 orang atau 45,81%. Pegawai Kementerian Sosial tersebar pada 7 Unit Eselon 1 dengan komposisi Sekretariat Jenderal sebanyak 524 orang, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 155 orang, Ditjen Rehabilitasi Sosial sebanyak 2.070 orang, Ditjen Pemberdayaan Sosial sebanyak 204 orang, Ditjen Penanganan Fakir Miskin sebanyak 136 orang, Inspektorat Jenderal sebanyak 124 orang, dan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebanyak 834 orang.

**Grafik 3.1**

**SDM Kemensos Menurut Jenis Kelamin dan Unit Kerja**

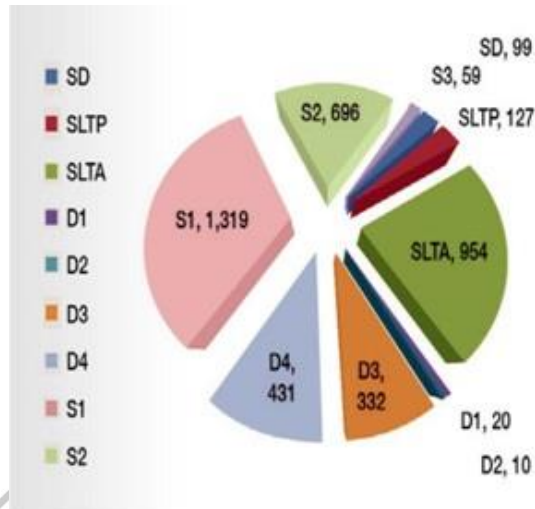


Sumber : LAKIN Kementerian Sosial Tahun 2016

Selain itu, jumlah pegawai Kementerian Sosial menurut Tingkat Pendidikan akan dijelaskan sebagaimana berikut : Pendidikan Doktor (S3) sebanyak 59 orang atau 1,5%, Magister (S2) sebanyak 696 orang atau 17,2%, Sarjana (S1) sebanyak 1.319 orang atau 32,6%, DIV sebanyak 431 orang atau 10,6%, DIII sebanyak 332 orang atau 8,2%, DII sebanyak 10 orang atau 0,2%, DI sebanyak 20 orang atau 0,5%, SLTA sebesar 954 orang atau 23,6%, SLTP sebesar 127 orang atau 3,1%, dan SD sebesar 99 orang atau 2,4%. Berdasarkan data yang disajikan oleh peneliti yang didapatkan langsung di Kementerian Sosial, tepatnya di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos memberikan kesempatan pada setiap golongan pendidikan untuk mendapatkan hak yang sama berupa pekerjaan di Organisasi tersebut.

**Grafik 3.2**

**SDM Kemensos Menurut Pendidikan**

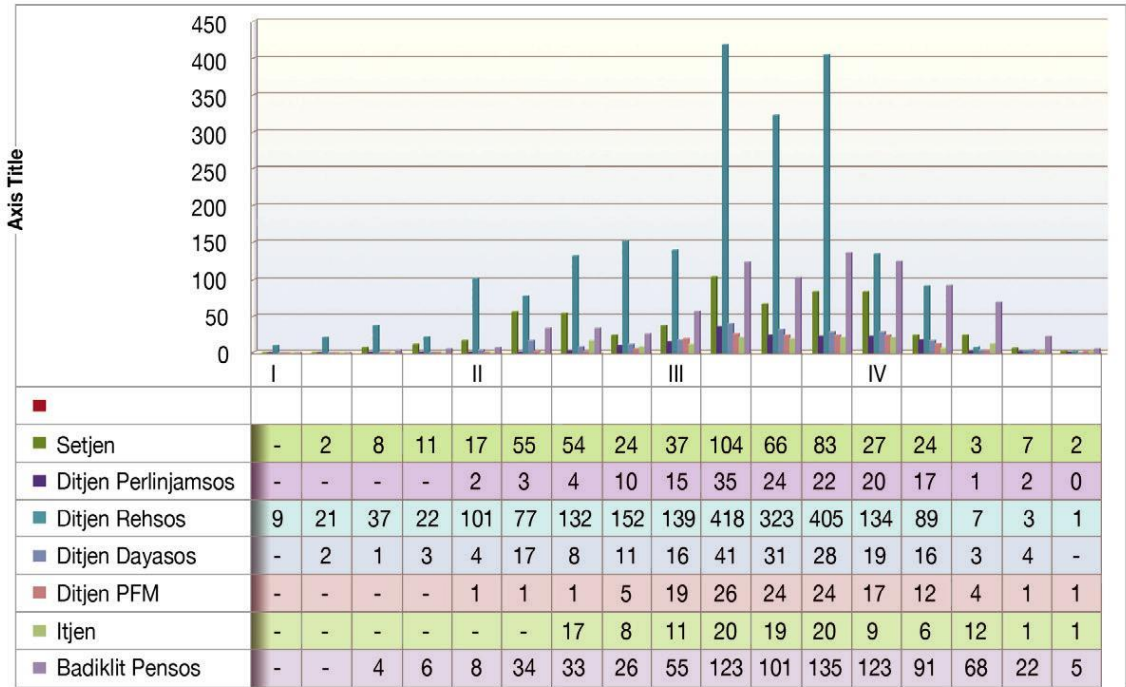


Sumber : LAKIN Kementerian Sosial Tahun 2016

Sedangkan pegawai Kementerian Sosial pada Tahun 2016 menurut golongan dan pangkat akan dijelaskan sebagai berikut : Golongan IV sebesar 752 orang atau 18,58%, Golongan III sebanyak 2.364 orang atau 58,41%, Golongan II sebanyak 805 orang atau 19,89% dan Golongan I sebesar 126 orang atau 3,11%. Jumlah golongan yang berada pada struktur pegawai Kemensos ini selalu mengalami perubahan, dikarenakan banyaknya perubahan dan keluar masuknya pegawai baru. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pegawai baru dikarenakan Kemensos sedang memerlukan banyak tenaga muda yang menguasai bidang teknologi modern dan dinilai pegawai muda lebih memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Tidak heran apa bila dalam grafis tersebut lulusan S1 sangatlah banyak dan lebih mendominasi dalam hal jumlah maupun beberapa jabatan sektoral yang memerlukan keterampilan khusus mereka.

**Grafik 3.3**

**SDM Kemensos Menurut Pangkat dan Unit Kerja**

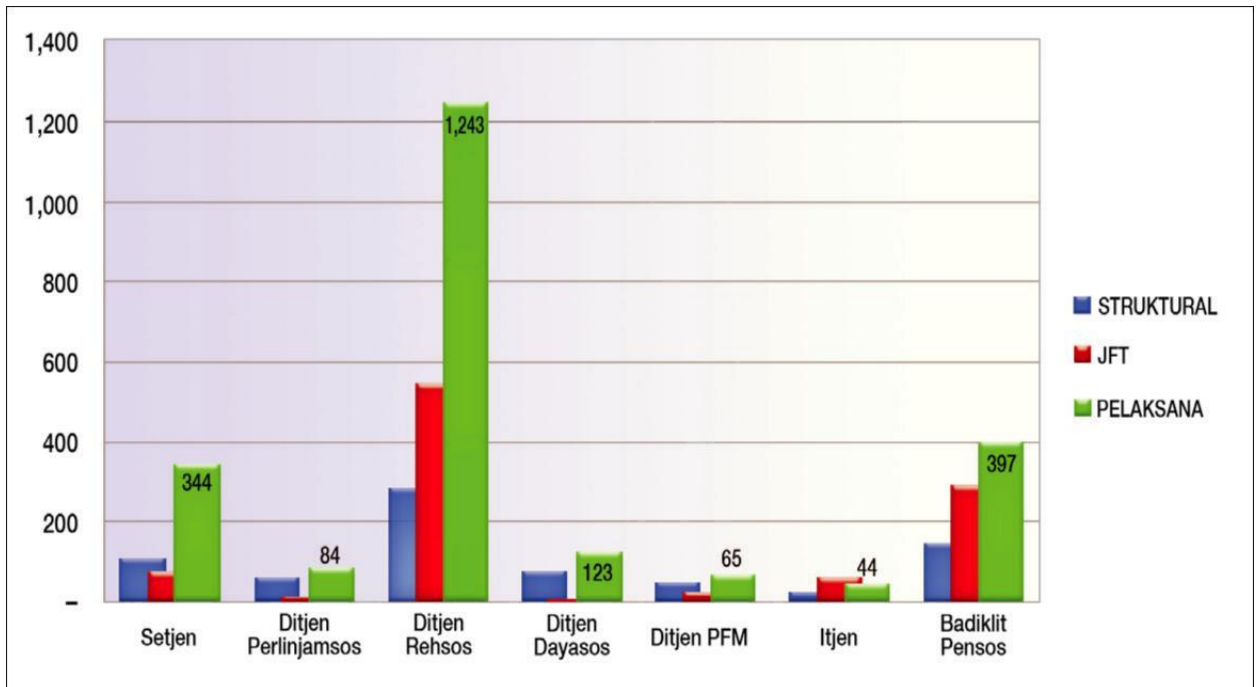


Sumber : LAKIN Kementerian Sosial Tahun 2016

Pegawai Kementerian Sosial yang menduduki Jabatan Struktural sebesar 734 orang atau 18,14%, Pejabat Fungsional Tertentu sebesar 1.013 orang atau 25,03%, dan Pelaksana sebesar 2.300 orang atau 56,83%. Selain itu pegawai Kementerian Sosial juga dibagi menjadi 3 (tiga) jenis dalam menjalankan masing-masing fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pembagian jumlah tersebut tentunya setelah melalui proses dan pertimbangan yang matang guna menilai kapasitas dan tingkat efektivitas pegawai yang sesuai dengan porsi beban kerja serta jumlah yang harus dipenuhi dalam mengemban tugas bersama, tenaga tersebut ada yang ditempatkan pada bagian strategis atau pelaksana.

**Grafik 3.4**

**SDM Kemensos Menurut Jabatan dan Unit Kerja**



Sumber : LAKIN Kementerian Sosial Tahun 2016

### **3.2 Profil Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial**

#### **1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Agar dapat melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: *pertama*, Menyelenggarakan Perumusan kebijakan atau regulasi di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,



penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

***Kedua,*** Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

***Ketiga,*** Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

***Keempat,*** Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang



tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan ; **Kelima**, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan; **Keenam**, Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; **Ketujuh**, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **2. Visi, Misi dan Perjanjian Kinerja**

**Visi** Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berlandaskan pada visi Kementerian Sosial, yaitu visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Presiden :

***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”(visi presiden).***

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud, maka misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan misi Kementerian Sosial, yaitu :

**Nawacita No. 5** : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Sementara itu *Misi* dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sangat berkaitan erat dengan visi yang telah disampaikan diatas, dan kajian tersebut berfokus pada :

***“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, melalui penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif”***

Selanjutnya yang akan peneliti bahas adalah *Perjanjian Kinerja*, merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan kepada bawahan secara berjenjang untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Renstra perubahan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2015-2019, yang diterbitkan tahun 2017 maka Direktorat

Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki sasaran strategis sebagai berikut yang akan dijelaskan lebih lanjut :

1. Terwujudnya kemandirian keluarga miskin dan PMKS lainnya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar.
2. Terwujudnya kemampuan bertahan hidup korban bencana dan kelompok rentan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk mengukur masing-masing sasaran telah ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**  
**Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial**

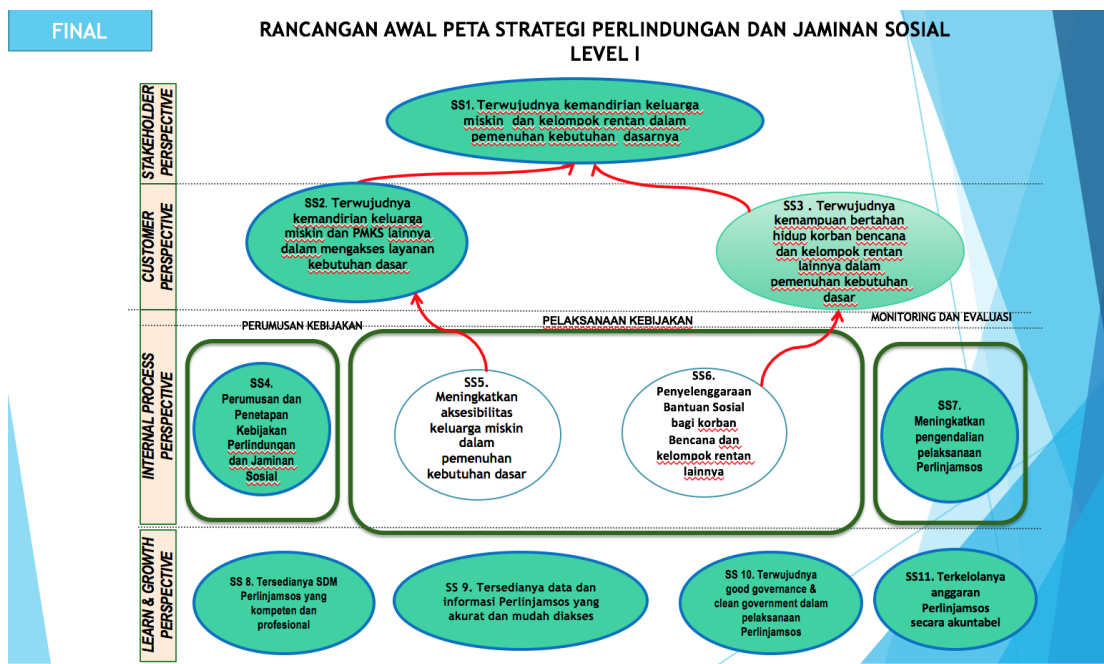
Sasaran	Indikator Kerja	Target
Terwujudnya kemandirian keluarga miskin dan PMKS lainnya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persentase (%) Keluarga miskin serta PMKS lainnya yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	3,5%
Terwujudnya kemampuan bertahan hidup korban bencana dan kelompok rentan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) Korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	100%

Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Ditjen Linjamsos

Pada proses perjalanannya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Indikator pada Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II mengalami perbaikan, yang sebelumnya masih berorientasi kepada output

menjadi mengarah pada outcome. Terdapat pohon kinerja yang secara spesifik menjelaskan capaian outcome eselon I serta indikator keberhasilannya. Peta Strategis ini akan digunakan sebagai dasar Perjanjian Kinerja tahun 2018.

**Gambar 3.3**  
**Rancangan Peta Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial**



Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Linjamsos.

### 3. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial menjalankan tugasnya melalui:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA)

3. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS)
4. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel)

**Gambar 3.4**

**STOK Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial**

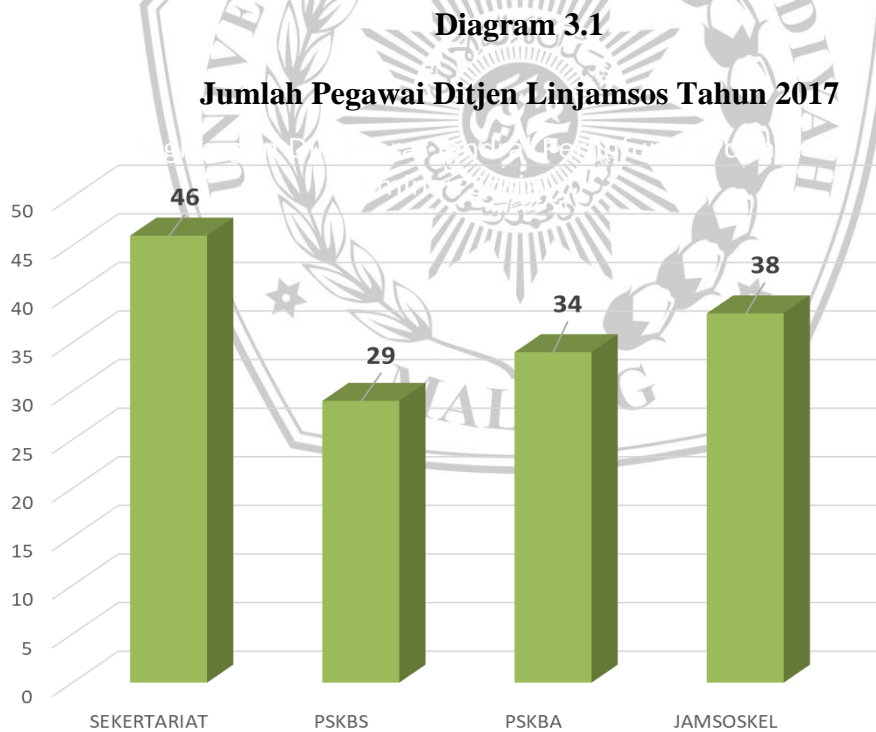


Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Ditjen Linjamsos.

Tugas Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penyusunan NSPK di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta

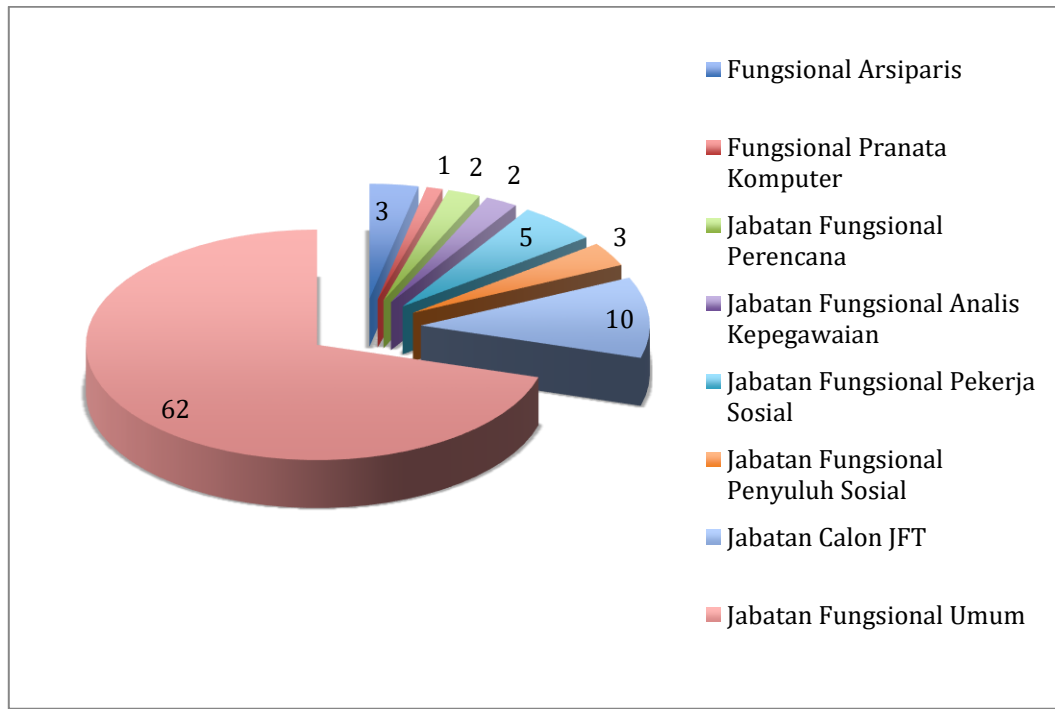
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang sesuai dengan ketentuan dan koridor yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional. SDM yang tersedia untuk memperkuat peran dan fungsi pada masing-masing bagian pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah berjumlah 147 orang, terdiri dari : 59 orang pejabat struktural, yaitu pejabat eselon II (1 orang), eselon I (3 orang), eselon III (16 orang). CPNS : orang, fungsional tertentu sejumlah 16 orang, calon jabatan fungsional tertentu sebanyak 10 orang, fungsional umum sebanyak 62 orang.



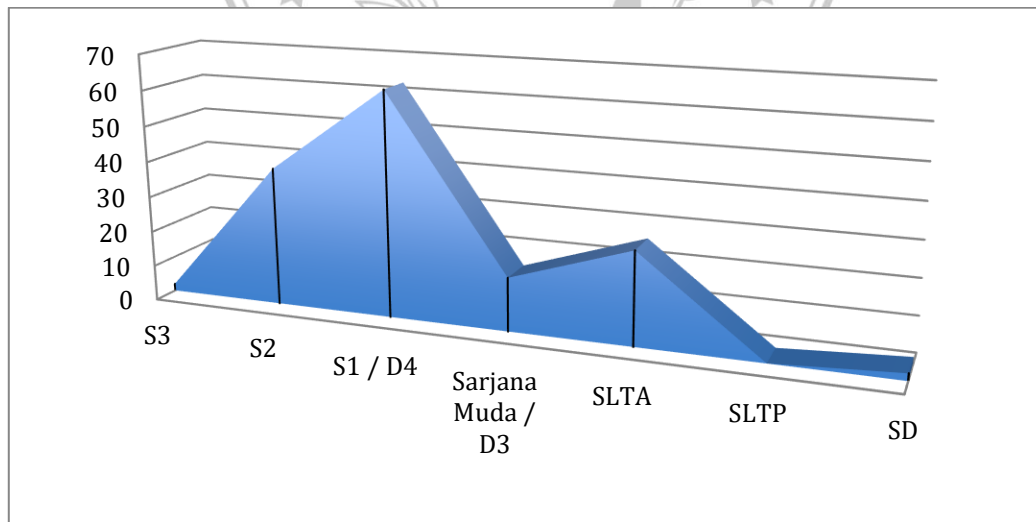
Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Ditjen Linjamsos

**Diagram 3.2**  
**Pegawai Ditjen Linjamsos Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2017**



Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Ditjen Linjamsos.

**Diagram 3.3**  
**Komposisi Pegawai Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017**



Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Ditjen Linjamsos.

#### 4. Isu Strategis

Setiap program yang direncanakan, pada dasarnya diupayakan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Terkait dengan hal ini, ada beberapa isu strategis di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang perlu segera diantisipasi dan dicari solusinya. Isu strategis organisasi yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2017 dan akan berkembang selanjutnya antara lain adalah :

**Tabel 3.2**  
**Isu Strategis Organisasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam**

Satuan Kerja	Isu Strategis
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam</b>	Implementasi dari pembagian peran Kementerian Sosial R.I dalam bidang penanggulangan bencana masih belum optimal.
	Kualitas jenis bantuan belum optimal terpenuhi dengan baik, terutama nutrisi dalam hal permakanaan ketika tanggap darurat.
	Perlunya penguatan aksesibilitas korban pasca bencana.

Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Ditjen Linjamsos

Untuk mempertegas peran Kementerian Sosial RI yang belum tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka pada tahun 2016 dilakukan nota kesepahaman antara kementerian Sosial RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.04 tahun 2016 – No. 37/BNPB/III/2016 tentang Penanggulangan Bencana tanggal 10 maret 2016. Adapun



yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kementerian Sosial RI dalam penanggulangan bencana adalah melaksanakan penyediaan dan penyaluran bantuan bencana, perlindungan dan pengungsian serta memberikan pelayanan psikososial korban bencana.

**Tabel 3.3**  
**Isu Strategis Organisasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**

Satuan Kerja	Isu Strategis
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial</b>	Perlu dibuatnya model penanganan isu-isu terkait bencana sosial.
	Perlunya sistem data mandiri untuk mengukur populasi korban bencana sosial.

Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Ditjen Linjamsos

Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan penanganan konflik sosial dibidang sosial, bekerja di 3 siklus penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan, penanganan penghentian dan pemulihan reintegrasi. Namun trend saat ini lebih berfokus pada pencegahan konflik sosial.

Pembahasan yang terakhir di bagian ini adalah JSK (Jaminan Sosial Keluarga) yang menurut peneliti merupakan organisasi yang memiliki peran penanggulangan bencana dibagian ke 4 (empat). Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian bahwa perlindungan yang diberikan Kementerian Sosial memiliki keunikan

yaitu di bagian terakhirnya, dimana yang tidak dimiliki oleh lembaga lain selain Kementerian Sosial.

**Tabel 3.4**  
**Isu Strategis Organisasi Jaminan Sosial Keluarga**

Satuan Kerja	Isu Strategis
<b>Jaminan Sosial Keluarga</b>	Penyempurnaan manajemen SDM dan pemenuhan rasio pendamping dan operator
	Pemutakhiran database ( informasi mengenai NIK) untuk mendukung komplementaritas PKH dengan program bantuan sosial lainnya (Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras Sejahtera /Bantuan Pangan Non Tunai)
	Optimalisasi pengalihan penyaluran bansos non tunai untuk penerapan keuangan inklusi.
	Peningkatan peran serta dan tanggung-jawab pemerintah daerah dalam verifikasi validasi data (verivali Pusdatin) untuk ketersediaan data perluasan <i>targeting</i> PKH termasuk lokasi PKH akses. (wilayah terpencil dan perbatasan)
	Pengembangan MIS untuk penguatan bisnis proses PKH
	Konsistensi pelaksanaan verifikasi komitmen dan penerapan sanksi.
	Sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi.
	Peningkatan Jumlah kelompok ibu PKH untuk mengikuti FDS

Sumber : Penjelasan Umum Organisasi Ditjen Linjamsos.

Dari beberapa Isu strategis yang telah dijabarkan tersebut maka perlunya prioritas yang harus segera ditindaklanjuti, hal tersebut antara lain :

1. Implementasi Pembagian Peran Kementerian Sosial RI dalam Penanggulangan bencana Alam.
2. Perlunya sistem data mandiri untuk mengukur populasi korban bencana sosial.
3. Sinkronisasi database yang belum optimal.
4. Belum optimalnya manajemen penyaluran bantuan melalui Himbara

Selain itu untuk menjawab beberapa isu strategis diatas, maka disusunlah Kebijakan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut :

1. Menjamin sistem perlindungan dan jaminan sosial kepada penduduk yang membutuhkan perlindungan sosial secara khusus yaitu penduduk rentan dan miskin.
2. Redistribusi secara menyeluruh, sinergis dan integrative untuk memenuhi hak dasar dan hak sosial bagi penduduk yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial secara khusus.
3. Efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.

### **3.3 Profil TAGANA (Taruna Siaga Bencana)**

Taruna Siaga Bencana atau biasa disingkat dengan TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan

tugas penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat bencana atau tanggap darurat, atau pun pasca bencana, serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai **Visi** dari Taruna Siaga Bencana, antara lain :

***“Menjadikan TAGANA sebagai relawan penanggulangan bencana, berbasis masyarakat yang bermartabat dan handal di bidang bantuan sosial”.***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan Misi yang sesuai juga, **Misi** tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

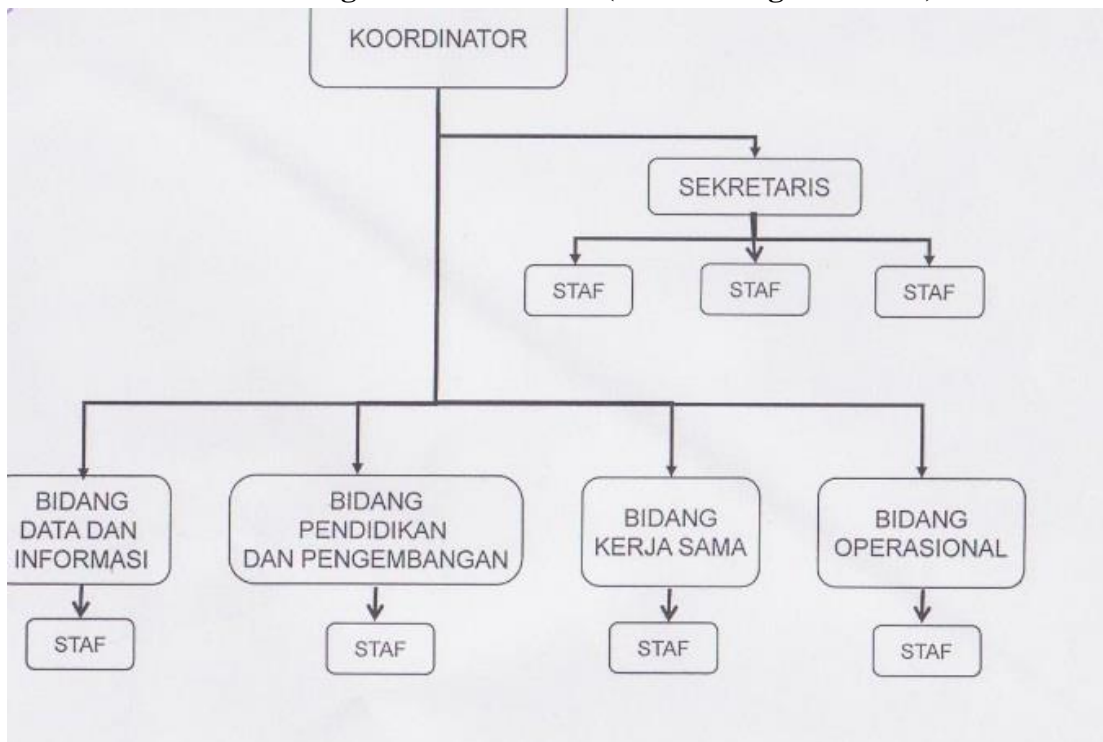
1. Membekali keahlian yang cukup melalui pendidikan dan pelatihan secara periodik sesuai jenis-jenis bencana.
2. Meningkatkan inovasi dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan potensi dilingkungannya,
3. Memberikan pemahaman tugas pokok dan fungsi TAGANA dalam penanggulangan bencana.

TAGANA ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana. TAGANA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. Ruang lingkup TAGANA telah diatur dalam PERMENSOS No. 28 Tahun 2012.<sup>72</sup> Yang telah sangat jelas menjabarkan garis besar haluan TAGANA. Lebih jelasnya lagi akan dijabarkan pada bagian Bab 4 (empat) karena skripsi peneliti lebih kepada gambaran umum.

---

<sup>72</sup> Bphn.go.id

**Gambar 3.5**  
**Struktur Organisasi TAGANA (Taruna Siaga Bencana)**



Sumber : Surat Keputusan Ditjen Linjamsos.

Struktur yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tersebut bertujuan untuk memudahkan organisasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam memobilisasi masyarakat dalam manajemen bencana. Setiap peran tersebut memiliki tugas pentingnya dalam membantu masyarakat menanggulangi bencana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kejelasan peran TAGANA dalam pembagian tugasnya. Keputusan tersebut telah melalui proses panjang dan pertimbangan dalam pembentukan organisasi dengan meminta saran dari BNPB sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terlebih dahulu.